

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Dengan demikian, setelah apa yang coba telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya dari mulai latar belakang masalah dan diakhiri dengan pembahasan yang penuh dengan informasi-informasi baru berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber. Dalam penelitian penulis kali ini yang membahas terkait dengan “Kekuatan Politik Partai Koalisi dan Hegemoni Kekuasaan di Era Kepemimpinan Joko Widodo- KH. Ma’ruf Amin Terhadap Parlemen di Indonesia Periode 2019-2024, studi kasus: Undang-undang Cipta Kerja *Omnibus Law*”.

Dari pembahasan diatas terkait dengan perumusan Undang-undang Cipta Kerja, penulis dapat menyimpulkan bahwa dirumuskannya undang-undang yang dikenal sebagai undang-undang “sapu jagad” tersebut memiliki urgensi untuk memulihkan kembali ekonomi nasional, dan memudahkan lajur investasi. Namun, yang menarik adalah dalam tahapan rancangan hingga disahkan menjadi sebuah undang-undang banyak sekali kesalahan dan cenderung terburu-buru dalam penetapannya. Sehingga muncul dinamika politik sebagai respon atas hal tersebut.

Adapun masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam Undang-undang tersebut dimana dari segi administrasi masih terdapat kesalahan, serta cacatnya naskah akademik pada undang-undang cipta kerja tersebut. Dilain hal banyaknya pasal-pasal yang kontroversial soal ketenagakerjaan dan lingkungan yang luput dari pembahasan serta diloloskan sedemikian rupa oleh kekuatan politik yang begitu besar di parlemen, seperti halnya kekuatan partai politik pendukung pemerintah.

Terdapatnya pola-pola konsolidasi yang dilakukan oleh partai politik pendukung pemerintah juga semakin memperlihatkan bahwa terjadinya dominasi parlemen yang diakibatkan adanya artikulasi dan agregasi kepentingan partai politik tersebut. Adanya konsep pemikiran “siapa mendapat apa” juga merupakan bukti adanya hubungan dimensi interaksi antar aktor serta oligarki yang terdapat di parlemen. Dalam proses perumusan hingga penetapan penulis juga melihat adanya dominasi yang dilakukan dengan mengabaikan interupsi yang dilakukan partai oposisi, yakni PKS dan Demokrat. Sehingga koalisi yang gemuk dalam parlemen ditambah dengan konsolidasi dan lobi-lobi politik yang dilakukan oleh partai pendukung pemerintah lah yang menyebabkan terjadinya fase hegemonik atau hegemoni kekuasaan di dalam parlemen itu sendiri.

## **5.2. Saran**

Setelah penulis mengamati apa yang terjadi dan dinamika politik apa saja yang terdapat pada parlemen di Indonesia saat ini. Saran dari penulis cukup sederhana, menurut penulis untuk kedepannya dalam proses pembuatan, pembahasan hingga penetapan suatu kebijakan. Parlemen dalam hal ini DPR RI yang dimana merupakan suatu lembaga yang merepresentasikan rakyat harus dapat lebih terbuka, melibatkan segala pihak untuk memberikan kritik dan saran agar kedepannya produk kebijakan kita menjadi lebih baik. Serta bukan hanya hal tersebut. Kekuatan politik yang timpang di parlemen saat ini, seharusnya bisa dapat dipahami oleh semua fraksi yang terdapat di parlemen untuk juga bisa saling berbagi dan saling menghormati setiap pendapat dengan tidak membatasi segala

pandangan yang keluar dari fraksi manapun, karena pada hakikatnya parlemen itu kata dasarnya *parlay* atau ramai, maka dari itu tunjukkan sikap demokratis kurangi adanya dominasi dan tentunya itu semua harusnya didasari dengan satu tujuan, yaitu demi bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

